



PROSIDING PERTEMUAN ILMIAH TAHUNAN (PIT) XVI IKATAN GEOGRAF INDONESIA (IGI)

Banjarmasin 2-3 Nopember 2013



**MEMPERKOKOH KESADARAN SPASIAL
KEPEMIMPINAN NKRI MENGHADAPI
TANTANGAN GLOBAL**



Penyelenggara Kegiatan

Ikatan Geograf Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan
Program Studi Pendidikan Geografi-FKIP
Universitas Lambung Mangkurat
Jl. Brigjen H. Hassan Basry Kotak Pos 87 Banjarmasin 70123

2013

KONTRIBUTOR

- PT. SEBUKU IRON LATERITIC ORES
- PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk.
- PT. BANK BTN
- PD BANGUN BANUA KALIMANTAN SELATAN
- IKATAN GEOGRAF INDONESIA
- PT. PRO FAJAR KOMUNIKA

Tim Penyusun

Tim Editor:

1. Prof. Dr. Suratman, M.Sc.
(Ketua Umum IGI Pusat)
2. Nasruddin, M.Sc.
(Ketua Umum IGI Provinsi Kalimantan Selatan)
3. Dr. Asep Karsidi, M.Sc.
(Dewan Pembina IGI Pusat)
4. Prof. Dr. Aris Poniman
(Dewan Pembina IGI Pusat)
5. Drs. Wahyu Utomo, M.Si.
(Dewan Pembina IGI Provinsi Kalimantan Selatan)

Komunikasi dan Sponsor:

Nasrudin
Deasy Arisaty
Rifka Ramadhani
Atang Atmaja
Fery Gusrianto

Desain Grafis

PT. Pro Fajar

Penerbit

PT. Pro Fajar

ISBN

~~978-602-1322-00-0~~





Prosiding Pertemuan Ilmiah Tahunan XVI
IKATAN GEOGRAF INDONESIA
Banjarmasin 2-3 Nopember



2013

Katalog Dalam Terbitan; Perpustakaan nasional Indonesia; Memperkokoh Kesadaran Spasial
Kepemimpinan NKRI Untuk Menghadapi Tantangan Global

ISBN 978-602-1322-00-0

Judul Buku : Memperkokoh Kesadaran Spasial Kepemimpinan NKRI Untuk Menghadapi Tantangan
Global

Penyusun :

IKATAN GEOGRAF INDONESIA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Perancang Sampul:

Hasa Noor Hasadi
Muhammad Zainuddin
Muhammad Muhaimin

Editor:

Prof. Dr. Suratman., M.Sc. (Ketua Umum IGI Pusat)
Nasruddin, M.Sc. (Ketua Umum IGI Kalimantan Selatan)
Dr. Asep Karsidi, M.Sc. (Dewan Pembina IGI Pusat)
Prof. Dr. Aris Poniman (Dewan Pembina IGI Pusat)
Drs. Wahyu Utomo, M.Si. (Dewan Pembina IGI Provinsi Kalimantan Selatan)

Penerbit :

PT. Pro Fajar Jakarta

Hak cipta ada pada penulis dan dilindungi Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2002, pasal 72 tentang HAK CIPTA.
Dilarang memperbanyak buku ini, tanpa ijin dari Penulis dan Penerbit



Dinamika dan Integrasi Makro Ekonomi Global Nasional serta Potret Ekonomi Regional Kalimantan <i>Ahmad Alim Bachri</i>	601
Kinerja Pembangunan Ekonomi dan Indek Pembangunan Manusia untuk Penyusunan Strategi Pengembangan Wilayah Kalimantan <i>Lutfi Muta'ali</i>	606
Masyarakat Tangguh Bencana dalam Geostrategis Indonesia <i>Djati Mardiatno</i>	621
Dicari Presiden RI yang Bervisi Geografis <i>Al. Susanto</i>	628
Pemindahan Ibukota RI ke Pulau Kalimantan (Analisa Geostrategis NKRI) <i>Nasruddin</i>	636
Pembekalan 'Map' Reading Guna Peningkatan Kesadaran Geografis Peserta Pendidikan Kepemimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI Dalam Rangka Ketahanan Nasional <i>Sukendra Martha</i>	645
Pembangunan Pulau-Pulau Kecil Terluar Sebagai Beranda Depan NKRI <i>Nasruddin., Wahyu Utomo., Lutfi Muta'ali., Su Ritohardoyo., R. Suharyadi., Aris Poniman</i>	652
Indonesia Sebagai Peristiwa, Fakta dan Nilai Geosfera <i>Momon Sudarma</i>	666
Pembakuan Nama Rupabumi Sebagai Bagian Geostrategis NKRI <i>Aji Putra Perdana</i>	675
Pemahaman Keruangan Dalam Konteks Memperkokoh Wawasan Nusantara <i>Rudiono</i>	686
Kajian Geografis Satuan-Satuan Tanah Super Tebal di Indonesia <i>Junun Sartohadi</i>	694
Menghadapi Tantangan Global Melalui Pembangunan Pedesaan <i>Eva Alviawati</i>	703
Falsafah "Memayu Hayuning Bawana" Sebagai Potensi Geostrategis dalam Undang - Undang No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam <i>Nurul Khotimah</i>	709
Delta Barito Sebagai Sumberdaya Kepesisiran di Kalimantan <i>Deasy Arisanty., Junun Sartohadi., Muh. Aris Marfai., Danang Sri Hadmoko</i>	717
Pengaruh Status Migrant Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Terhadap Remitansi dan Daerah Asal <i>Budijanto</i>	721



**‘FALSAFAH “MEMAYU HAYUNING BAWANA” SEBAGAI POTENSI GEOSTRATEGIS DALAM
UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2012
TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TERHADAP PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM**

Nurul Khotimah

Prodi Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta
nurul_khotimah79@yahoo.co.id.

ABSTRAK

Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, memberikan semangat baru bagi Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta untuk berkarya, mengabdikan, kepada daerahnya demi kesejahteraan bersama. Perilaku masyarakat terhadap alam yang ada di sekitarnya dengan berbagai warna budaya dalam pengelolaan sumber daya alam sebagai potensi geostrategis bagi keberadaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam ranah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Memayu Hayuning Bawana sebagai salah satu falsafah hidup orang Jawa khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mencerminkan hubungan antara manusia dengan alam, dimana orang Jawa merasa berkewajiban untuk “memayu hayuning bawana” atau memperindah keindahan dunia, karena hanya inilah yang memberi arti pada hidup.

Sebuah dinamika terjadi dalam masyarakat modern di zaman ini dengan perilaku dan karakteristik yang berbeda-beda terhadap lingkungannya. Tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup membuat perilaku masyarakat cenderung merusak lingkungan yang berada di sekitarnya terutama menyimpang dari peruntukannya. “Bawana” dalam kajian geografi secara spasial dapat diartikan sebagai konsep bentanglahan yang mempunyai komponen memiliki sifat dan karakteristik sendiri-sendiri secara morfologi, morfometri, morfogenesis, dan morfokronologi. Sebuah falsafah hidup yang merupakan potensi geostrategis dalam pengelolaan sumberdaya alam di era modern ini yang dimiliki Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kata Kunci: Falsafah hidup, potensi geostrategis, pengelolaan sumberdaya alam

Pendahuluan

Pasal 18 UUD 1945 memberi pengakuan formal terhadap daerah-daerah yang memiliki keistimewaan dimana pengaturan tentang Daerah Istimewa ditetapkan dengan sebuah undang-undang, mengingat hak asal usul yang berlaku di daerah istimewa itu. Dengan kata lain sekalipun *de facto* keistimewaan Yogyakarta diakui, akan tetapi secara *de jure* memerlukan pengaturan atau ketentuan hukum yang pasti, dan meskipun sebenarnya secara *de jure* pengakuan terhadap keistimewaan Yogyakarta sudah dilakukan melalui Undang-undang No. 3 Tahun 1950 juncto Undang-undang No. 19 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang ditetapkan pada tanggal 4 Maret 1950, namun secara eksplisit kedua undang-undang tersebut belum memuat tentang pengaturan-pengaturan hal-hal yang berkaitan dengan substansi keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2013: 149).

Dengan disahkannya Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, memberikan semangat baru bagi Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta untuk berkarya, mengabdikan, kepada daerahnya demi kesejahteraan bersama. Pada Bab III tentang Asas dan Tujuan, Bagian Kesatu, Asas, Pasal 4, mengatakan Pengaturan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan berdasarkan: (a) pengakuan atas hak asal-usul; (b) kerakyatan; (c) demokrasi; (d) ke-bhinekaan-tunggal-ika; (e) efektifitas pemerintahan; (f) kepentingan nasional dan; (g) pendayagunaan kearifan lokal. Hal terakhir yang disebutkan pada Asas dan Tujuan tersebut adalah pendayagunaan kearifan lokal dalam berbagai bidang. Beberapa bidang yang menjadi kewenangan dalam keistimewaan, seperti pada Pasal 7 ayat (2) bagian (c) kebudayaan; (d) pertanahan; dan (e) tata ruang. Pasal 7 ayat (3)

tentang penyelenggaraan kewenangan dalam urusan keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan pada rakyat.

Kearifan Lokal dalam Perspektif Orang Jawa

Orang Jawa memiliki sebuah gambaran perilaku terhadap alam yang ada di sekitarnya dengan berbagai warna budaya dalam pengelolaan sumber daya alamnya. Hal ini berangkat dari pemikiran bahwa pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok atau yang disebut masyarakat pengelola sumber daya alam. Kepentingan individu dan kelompok untuk mencukupi kebutuhan hidup demi kelangsungan hidup pribadi maupun masyarakat itu sendiri. Kebutuhan hidup tersebut meliputi kebutuhan yang bersifat primer atau kebutuhan pokok dan kebutuhan sekunder atau kebutuhan penunjang. Kebutuhan primer dapat berupa pangan, sandang dan papan, sedangkan kebutuhan sekunder dapat berupa pendidikan, alat transportasi, dan kebutuhan yang menunjang perjalanan hidup manusia sehari-hari.

Menurut Nasruddin Anshoriy dan Sudarsono (2008: 1), konsep tentang alam bagi orang Jawa digambarkan melalui jejer atau adegan pertama dalam adegan pewayangan, seorang dalang akan memberikan wawasan tentang keindahan alam, kemakmuran, dan kewibawaan suatu Negara dengan menancapkan dua buah gunung di kanan dan kiri simpingan sebagai simbol dari alam duniawi. Cara pelukisan semua Negara dan rajanya boleh dikatakan stereotip. Untuk Negara menggunakan lukisan ingkang panjang punjung pasir wukir gemah ripah loh jinawi tata tenterem kerta raharja, merupakan gambaran suatu Negara yang adil makmur tidak ada suatu cela apapun. Untuk melukiskan kewibawaan, keagungan, dan kebijakan raja diceritakan: narendra ingkang kinasih dewa, kinawula ing widadari, cinedhak ing brahmana, lan kinacek sesamaning narendra. Narendra guna ing aguna tan ngendhak gunaning janma, paring payung kang kudan, paring tekan kang kelunyon, paring obor kang kepetengan. Seorang raja harus memiliki sesuatu yang lebih dari manusia biasa dan sesama raja serta mampu mengayomi seluruh warga negaranya.

Suwardi Endraswara (2013: 15), mengemukakan bahwa orang Jawa telah memiliki sandaran bertindak yang benar-benar cerdas, yang merupakan rangkuman perisai hidup yaitu "memayu hayuning bawana". Menurut Bambang Widianto dan Iwan Meulia Pirous (2009: xiv), sebagai idiologi dalam sistem budaya adalah sebuah keyakinan yang juga alat pembenaran (*justification*) dan akses dalam memakai berbagai sumber daya kemasyarakatan (*socio-political-resources*) yang ada. Lebih lanjut dikemukakan oleh Bambang Widianto dan Iwan Meulia Pirous (2009: xx), bahwa beberapa individu maupun kelompok yang memanfaatkan sumber daya alam telah memiliki program atau rangkaian rencana kegiatan yang ada di sekitarnya. Selain itu ada juga pemanfaatan lain yang secara historis telah ada sejak lama dan yang melaksanakan pemanfaatan telah sesuai dengan kaidah-kaidah ekologis.

Suwardi Endraswara (2013: 17), mengemukakan bahwa "memayu hayuning bawana" memang upaya melindungi keselamatan (kesejahteraan) dunia baik lahir maupun batin, dunia dalam hal ini identik dengan bawana. Koentjaraningrat (1984: 435) dalam Suwardi Endraswara (2013: 17), menyinggung pula tentang "memayu hayuning bawana" pada bab hubungan antara manusia dengan alam, dimana orang Jawa merasa berkewajiban untuk "memayu hayuning bawana" atau memperindah keindahan dunia, karena hanya inilah yang memberi arti pada hidup. Koentjaraningrat juga mengemukakan bahwa orang desa yang bodohpun akan membicarakan persoalan itu. Di satu pihak orang menganggap secara harfiah, bahwa manusia harus memiliki kesadaran untuk memelihara dan memperbaiki lingkungan fisiknya yakni pekarangan sekitar rumah, desa, dan sebagainya. Secara abstrak, bahwa orang wajib memelihara serta memperbaiki lingkungan spiritualnya, yaitu adat, tata cara serta cita-cita dan nilai-nilai pribadi. Pandangan ini memberikan dorongan bahwa hidup manusia tidak mungkin lepas dari lingkungannya. Orang Jawa menyebutkan bahwa manusia hendaknya arif lingkungan, tidak merusak, dan berbuat semena-mena.

Falsafah “memayu hayuning bawana” dalam kosmologi orang Jawa merupakan sebuah idiologi. Menurut Bambang Widiyanto dan Iwan Meulia Pirous (2009: 2), idiologi adalah gagasan dalam kebudayaan, dengan sadar diciptakan dan disusun sebagai pedoman untuk suatu warga Negara. Pemimpin yang bijaksana berarti telah “memayu hayuning bawana”. Ayu-hayu dan rahayu menunjuk makna keselamatan. Memayu berarti membuat selamat, sedangkan bawana adalah istilah lain untuk buana, dunia, atau jagad. Upaya menjaga kelestarian lingkungan adalah wujud nyata “memayu hayuning bawana”. Polusi air, tanah, dan udara harus dihindari demi masa depan. Kerusakan alam membawa bencana yang amat merugikan. Banjir, tanah longsor, kekeringan banyak disebabkan oleh tangan-tangan manusia yang kurang memperhatikan kelestarian alam. Seandainya sejak taman kanak-kanak ditanamkan tentang lingkungan hidup maka Indonesia akan tampil sebagai taman sari dunia sesuai dengan konsep Jawa “memayu hayuning bawana” (Nasruddin Anshori dan Sudarsono, 2008: 151).

Bentanglahan Sebagai Konsep “Bawana” di Daerah Istimewa Yogyakarta

Kearifan adalah seperti sebuah kemauan untuk melihat rambu-rambu itu. Kemauan merasakan, melihat, mengaggas, dan kemudian patuh terhadap rambu-rambu itu. Rambu-rambu yang sebenarnya adalah sebuah Hukum Alam yang diciptakan Sang Pencipta, yang mau tidak mau kita akan tunduk kepadanya (Pitoyo Amrih, 2008:24). Hukum Alam, Takdir Alam merupakan sebuah jembatan berpikir bagi manusia berbudaya untuk menyadari keberadaan Tuhannya dengan berpatokan pada lingkungan yang ada di sekitarnya.

Sebuah dinamika terjadi dalam masyarakat modern di zaman ini dengan perilaku dan karakteristik yang berbeda-beda terhadap lingkungannya. Tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup membuat perilaku masyarakat cenderung merusak lingkungan yang berada di sekitarnya terutama menyimpang dari peruntukannya. Berbagai contoh dapat kita lihat, misalnya bencana erupsi Gunung Merapi tahun 2010, perilaku masyarakat di sekitar lereng Merapi yang menyimpang dari hukum alam, terkena dampaknya, yaitu hancurnya permukiman di wilayah bantaran kali Gendol (Kabupaten Sleman) yang merupakan jalur aliran lava erupsi Merapi. Permukiman yang terbentuk pada radius rawan bencana merupakan sebuah penyimpangan hukum alam yang dilakukan manusia karena keterbatasan lahan yang ada. Contoh lain adalah permukiman yang ada di wilayah pantai Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta yang terkena abrasi (Kabupaten Bantul), permukiman di wilayah Samigaluh Kabupaten Kulonprogo yang terkena longsor lahan, dan permukiman di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang terkena bencana kekeringan. Hal ini adalah sebuah contoh jelas terhadap penyimpangan Hukum Alam yang dilakukan oleh perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang semakin mendesak.

Manusia sesuai kodratnya diberikan kelebihan ilmu pengetahuan yang secara alami (*instinctive*), dapat muncul dengan sendirinya tergantung kepada kepekaan dalam menanggapi ataupun membaca fenomena alam dan kemudian menerjemahkan ke dalam dunia nyata (*real world*) sebagai tindakan nyata manusia. Manusia selalu diuji kepekaannya dalam menanggapi tanda-tanda alam, untuk itu manusia selalu meningkatkan kemampuan budaya, mulai dari budaya yang hanya sekedar untuk mempertahankan hidup (*survival*) hingga budaya untuk membuat rekayasa menciptakan lingkungan yang nyaman, sejahtera, dan berkelanjutan (*suistainable*) (Totok Gunawan, 2007).

Konsep “bawana” yang ada belum secara maksimal dimengerti oleh masyarakat secara jelas, karena keterbatasan pengetahuan dan pendidikan yang dimiliki masyarakat. “Bawana” dalam kajian geografi secara spasial dapat diartikan sebagai konsep bentanglahan. Dalam bentanglahan mempunyai komponen yang masing-masing komponen memiliki sifat dan karakteristik sendiri-sendiri secara morfologi, morfometri, morfogenesis, dan morfokronologi.

Ekosistem bentanglahan di Daerah Istimewa Yogyakarta cukup kompleks dan beranekaragam, hal ini juga menyebabkan kompleksnya permasalahan lingkungan yang terjadi selama ini. Apa yang harus diketahui terlebih dahulu sebelum melakukan pengelolaan lingkungan adalah perlu dilakukan identifikasi karakteristik ekologi, setelah itu perlu diketahui sejauhmana

tingkat dan sebaran spasial eksploitasi sumberdaya alam dan sumberdaya lahan tersebut (Totok Gunawan, 2007).

Dalam kajian ini dapat diungkapkan konsep *bawana* yang ada pada falsafah hidup orang Jawa dengan empat unsur/matra yang ada dalam *bawana* tersebut yaitu, air, tanah, udara, dan api. Konsep morfologi, morfometri, morfogenesis, dan morfokronologi dapat dijadikan pijakan untuk menentukan perilaku kehidupan yang arif terhadap lingkungannya. Keempat unsur tersebut sebenarnya tergambarkan dengan jelas dari bentanglahan lahan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, Gunung Merapi sebagai unsur api disini, dengan lereng sebagai wilayah Kabupaten Sleman dan dataran aluvialnya sampai ke Wilayah Kabupaten Bantul sebagai unsur tanahnya, Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulonprogo dengan topografi perbukitan hingga pegunungan merupakan unsur udara, dan laut selatan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unsur airnya.

Sebagai sebuah Gunung api yang aktif, Merapi sebagai unsur api merupakan potensi perusak dan potensi tenaga bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya. Potensi perusak yang dimaksud adalah apabila terjadi erupsi maka akan memakan korban jiwa, harta, maupun wujud korban yang lain terutama kerusakan alam dari akibat yang ditimbulkan. Akan tetapi jika ditinjau dari potensi sebagai sumber tenaga, Merapi mempunyai potensi yang sangat besar untuk dikelola sebagai sumber tenaga, sumber dana/masukan bagi masyarakat, maupun pemerintah daerah di sekitarnya. Potensi bahan galian golongan C, pasir dan batu tidak akan habis, hanya dalam pengelolaannya yang tidak mengikuti falsafah kehidupan orang Jawa justru membuat kerusakan pada "*bawana*" yang ada. Alam memberikan potensinya, justru manusia karena perilakunya menjadi sebuah ancaman bagi keselamatan hidupnya dan keberlanjutan lingkungannya.

Wilayah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul mewakili unsur tanah sebagai perwujudan tempat akhir tujuan manusia setelah hidup di dunia untuk menuju ke akhirat, memberikan potensi alam yang subur bagi pertanian, dengan air bersih dari air tanah yang ada potensi kuantitas dan kualitasnya. Akan tetapi yang terjadi sekarang adalah sebaliknya, wilayah Kabupaten Sleman yang merupakan wilayah tangkapan air (*recharge area*) dijadikan sebagai kawasan perumahan elite, kampus elite, dan penggunaan lahan yang mengurangi kemampuan tanah untuk menangkap air hujan yang jatuh dari langit. Hal ini yang sekarang terbuktikan dengan semakin dalamnya permukaan air tanah, dengan Kota Yogyakarta yang dijadikan sebagai pusat ekonomi dan bisnis dengan munculnya hotel-hotel bintang lima, pusat perbelanjaan (*mal*) yang dengan sendirinya menggunakan air tanah maupun air tanah dalam untuk memenuhi kebutuhannya. Limbah yang dihasilkan, yang berupa limbah padat, cair, maupun udara menjadikan kualitas air sungai, air sumur menjadi menurun.

Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulonprogo sebagai perwujudan unsur udara dengan topografi perbukitan hingga pegunungan menjadi sebuah kenyataan yang bertolak belakang apabila ditinjau dari aspek kebutuhan air. Ketika musim kemarau, air di Kabupaten Gunungkidul bagaikan emas dan intan sebagai kebutuhan hidup yang sangat dibutuhkan karena keunikan topografinya yaitu karst, dengan sistem akifer yang khas pula, sedangkan di Kabupaten Kulonprogo ketika musim kemarau tidak menjadi masalah karena kehidupan sehari-harinya tercukupi, akan tetapi ketika musim penghujan tiba dengan intensitas hujan yang tinggi maka longsor lahan yang mengancam mereka.

Unsur air yang diwakili oleh laut selatan di Daerah Istimewa Yogyakarta menyimpan potensi positif maupun potensi negatif sebagai ancaman bagi kehidupan manusia di sekitarnya. Potensi positif sebagai sumber energi terbarukan yang belum tergali hingga sekarang, sebagai potensi negatif adalah ancaman tsunami dan abrasi yang terjadi pada akhir-akhir ini.

Keempat unsur, baik api, tanah, udara, maupun air, dapat dihubungkan dengan sebuah garis Imajiner sebagai falsafah hidup orang Jawa khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Karaton Yogyakarta sebagai pusat kehidupan dengan Sultan sebagai rajanya. Raja sebagai wakil Tuhan di dunia didudukkan sebagai khalifah dengan gelar "*sayidin panata gama kalifatullah*", harus mampu menyeimbangkan keempat unsur tersebut dalam berbagai sendi kehidupan.

Peranan Sultan sebagai potensi Geostrategis untuk menentukan arah pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sangat besar dengan gelar tersebut.

Pada pidato sabdaraja ketika Jumenengan Sri Sultan Hamengku Buwono X, “tahta untuk rakyat” dapat diejawantahkan sebagai konsep geostrategis yang mengandung potensi yang sangat besar dalam pengelolaan sumberdaya alam yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini didukung dengan disahkannya Undang-Undang No. 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Lengkap sudah potensi geostrategis yang dimiliki Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengelolaan sumberdaya alam dalam konsep falsafah “Memayu Hayuning Bawana”.

“Paugeran” Sebagai Benteng Kelestarian Alam di Daerah Istimewa Yogyakarta

Paugeran dalam bahasa sehari-hari biasa diartikan sebagai aturan yang tertulis maupun tidak tertulis, dalam masyarakat Jawa khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan benteng kehidupan untuk kelestarian alam. Salah satu contoh adalah keberadaan situs-situs bersejarah yang berkaitan dengan Karaton Yogyakarta, yang tersebar merata di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Masjid Pathok Nagari yang berada di 4 penjuru mata angin sebenarnya sebagai tanda/paugeran untuk pendidikan masyarakat dalam hal keagamaan guna menjaga kondisi masyarakat di daerah itu.

Keberadaan Masjid Pathok Nagari di wilayah Desa Wonokromo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul, merupakan situs bersejarah dengan keterkaitan yang kuat dengan Karaton Yogyakarta mampu membentuk masyarakat yang agamis dan madani dengan berkembangnya pondok pesantren di sekitarnya sehingga mampu untuk dimanfaatkan sebagai media transfer ilmu guna keberlanjutan dari keberadaan masjid tersebut, hal ini terjadi pada 3 (tiga) masjid pathok nagari yang lain, yaitu di Mlangi Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman, di Plasa Kuning Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman, dan di Wot Galeh Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman. Kondisi seperti inilah yang bisa dijadikan potensi untuk keberlanjutan sumberdaya alam.

Paugeran yang lain adalah munculnya falsafah-falsafah hidup orang Jawa yang merupakan nasihat hidup bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, contohnya: “rukun agawe santosa, crah agawe bubrah”, peribahasa ini kelihatan sederhana, akan tetapi merupakan cita-cita hidup masyarakat Jawa yang mendambakan kehidupan yang damai sejahtera, aman tentram, dan bahagia. Dalam hal ini kehidupan di dunia dan di akhirat yang berasaskan pada pedoman hidup yaitu agama (Imam Budi Santosa, 2012:42). *Tata Tenteram Karta Raharja*, sebuah kalimat dari kata berjenjang *tata-titi, tatas-titis, tatag-tutug* berkaitan dengan komitmen suatu komunitas dalam ketaatan hukum dan norma yang telah disepakati bersama. Konvensi dan aturan main bersama harus dilaksanakan sebaik-baiknya agar keserasian dan keselarasan tetap terjaga (Nashruddin Anshoriy dan Sudarsono, 2008:223).

Kecenderungan zaman modern yang sangat dipengaruhi *developmentalisme* tidak memasukkan pelestarian kekayaan sosial budaya sebagai bahan integral dari seluruh program pembangunan. Dalam *developmentalisme*, *traditionalisme* dipertentangkan dengan *modernisme*. Kekayaan budaya dan kearifan tradisional diabaikan (Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI, 2006:10). Dengan mengabaikan ranah sosial budaya tersebut menjadikan beberapa sendi kehidupan yang tidak terjaga kelestariannya.

Tiga ranah hubungan yang sekaligus secara bersamaan harus dilakukan oleh masing-masing manusia untuk menjaga harmonisasi dengan lingkungannya, yaitu: (1) hubungan antara manusia dengan manusia atau *gegayutaning manungsa karo manungsa*. Hubungan yang harmonis dalam masyarakat yang majemuk, ada tenggang rasa yang tinggi, menghormati perbedaan dan mencari kesamaannya menggalang persatuan dan kesatuan, tidak memaksakan kehendak sendiri pada orang lain, *bisa rumangsa* dan bukan *rumangsa bisa* dan lain-lain; (2) Hubungan antara manusia dengan alam semesta atau *gegayutaning manungsa karo alam*, dengan menyadari bahwa alam telah banyak memberikan kesejahteraan pada manusia dan melalui alam maka manusia dapat belajar banyak darinya, maka sudah seharusnya manusia berterima kasih dan mensyukuri kepada alam yang demikian bersahabat dan bukan sebaliknya,

kebaikan hati alam dibalas dengan perusakan alam; (3) Hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa Sang Pencipta Alam atau *gegayutaning manungsa karo Gusti Kang Murbeng Dumadi, Ingkang Akaryo Jagad*, dengan menyadari dari siapa diri kita ini di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, sudah semestinya kita harus senantiasa mengikuti aturan-aturan Tuhan (Pranoto dalam Suwardi Endraswara, 2013: 58-59).

Kearifan Lokal di Daerah Istimewa Yogyakarta

Menurut Suwardi Endraswara (2013: 35), kearifan lokal dinyatakan sebagai gumpalan makna, di dalamnya ada jaring-jaring makna, di dalamnya juga ada jutaan bahkan miliaran makna. Kearifan lokal juga diibaratkan sumur, tidak akan habis ditimba maknanya, di musim kemarau sekalipun. “Memayu hayuning bawana” adalah kearifan lokal yang memiliki sifat *open interpretation* dan menjadi akar kearifan lokal orang Jawa. “Memayu hayuning bawana” dijadikan kearifan lokal yang setiap saat dapat secara dinamis berubah mengikuti zaman, sehingga membuat manusia Jawa semakin arif, yang diperuntukkan memperindah dunia melalui berbagai strategi. Tidak dipungkiri bahwa pesatnya pembangunan yang berlangsung selama ini telah berhasil meningkatkan taraf hidup sebagian masyarakat. Peningkatan taraf hidup tersebut ternyata diikuti oleh peningkatan jumlah-ragam maupun kualitas kebutuhan. Akibatnya masyarakat berlomba-lomba untuk meningkatkan produksi untuk dilempar ke pasar. Sejalan dengan itu pula peningkatan produktivitas tanpa menghiraukan kelestarian fungsi lingkungan (Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, 2002: 2).

Peningkatan kebutuhan hidup manusia sebagai individu maupun kelompok juga perlu diimbangi dengan kearifan dalam pengelolaan sumber daya alam. Kearifan tersebut diperlukan untuk mengendalikan terjadinya degradasi kualitas sumber daya alam. Pengambilan keputusan yang arif biasanya dianggap atau diyakini telah mengambil suatu keputusan yang bijaksana, benar, tepat, adil, serasi dan harmonis, setelah memperhatikan dan menelusuri berbagai informasi, pengetahuan, pengalaman, serta mengindahkan kepentingan berbagai pihak (Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, 2002: 1).

Kebutuhan lahan permukiman dan industri telah mendesak keberadaan lahan pertanian dan lahan resapan air sehingga permasalahan akan muncul mengiringi laju perubahan lahan yang ada. Daerah Istimewa Yogyakarta dengan keberadaan Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta apakah mampu menjawab persoalan yang ada mengenai pengelolaan sumber daya alam? Garis imajiner antara Gunung Merapi, Karaton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, dan Laut Selatan memiliki makna yang luas secara kosmologis. Keberadaan garis imajiner ini juga dapat diartikan dengan kondisi lingkungan yang berada di sepanjang garis imajiner tersebut. Garis imajiner tersebut dalam praktik kehidupan sosial Jawa terutama Daerah Istimewa Yogyakarta tidak akan lepas dari aspek-aspek *religious*.

Religi sering melandasi hubungan sosial kemasyarakatan. Dalam kaitan ini, Beatty (1999) dalam Suwardi Endraswara (2013: 143), memandang ada empat hal yang saling terkait dalam kehidupan *socio-religious* orang Jawa, yaitu (1) dalam pengertian puitis, tubuh manusia adalah cermin dari dunia. Manusia mengandung laut dan gunungnya sendiri-sendiri, sumber cahaya (mata), dan sebagainya. Tokoh historis dan kultural dicerminkan dalam konstitusi manusia; (2) manusia adalah pola dasar dari pembentukan kosmos. Dengan kata lain, manusia adalah pusat dari kosmos yang sudah terpola dan kunci untuk desainnya. Numerology mengungkapkan atau menguraikan hubungan antara mikrokosmos dengan makrokosmos dalam klasifikasi simbolik; (3) tubuh dan dunia tersusun dari bahan yang sama; empat elemen (anasir papat), yaitu tanah, udara, api, dan air. Hal ini kadang-kadang dinyatakan secara abstrak. Tanah adalah materi atau “yang memberi/menduduki tempat” (mapan); angin menandakan “yang menggerakkan sesuatu”; api menandakan panas dan cahaya; dan air untuk cairan; (4) “dunia dan manusia eksis bersama”.

Gunung Merapi yang merupakan fenomena alam dengan keaktifannya memberikan munculnya suatu nilai di masyarakat sekitarnya, yakni tentang mitigasi bencana yang secara lokal dapat terbuktikan. Kearifan lokal yang dipelopori oleh Mbah Marijan atau Kanjeng Mas

Tumenggung (KMT) Surakso Hargo, dimana keberadaan Gunung Merapi sebagai berkah dari Tuhan Yang Maha Esa bukan sebuah ancaman. Gunung Merapi dengan segala fenomena dan aktivitasnya merupakan wilayah tangkapan (*recharge area*) yang seharusnya dijaga kelestariannya, seperti makna hargo atau gunung yang berbentuk kerucut dengan puncak sebagai manifestasi iman manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa yang harus dipertahankan agar selalu terjaga. Adanya penambangan galian golongan C yang tidak terkendali dan telah merusak lingkungan hidup, maka letusan Merapi tahun 2010 menjadi sebuah jawaban murkanya Tuhan kepada umatnya. Hal ini untuk mengingatkan bahwa tindakan manusia telah merusak lingkungan hidup, yang bukan hanya menjadi hak manusia saja, akan tetapi juga makhluk hidup lainnya.

Oleh karena itu, terjaganya kondisi alam Gunung Merapi maka akan menjaga pula ketersediaan air bagi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang diwakili oleh keberadaan Karaton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Ketersediaan air bersih mampu menunjang kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Kota Yogyakarta. Dilewatinya Kota Yogyakarta oleh 3 (tiga) sungai yang berhulu di Gunung Merapi, yaitu Sungai Code, Sungai Winongo, dan Sungai Gajah Wong menjadikan Kota Yogyakarta tidak kekurangan air bersih. Kondisi alam ini seharusnya disadari oleh masyarakat Kota Yogyakarta dengan menjaga kelestarian sungai yang ada di lingkungan mereka.

Samudera Indonesia (Laut Selatan) yang berada di selatan garis imajiner sebagai hilir atau muara dari semua kepentingan yang ada di wilayah Gunung Merapi dan Kota Yogyakarta. Yang dimaksud hulu/muara disini adalah sebagai penampungan bagi seluruh hasil aktivitas yang dilakukan di atasnya. Hasil aktivitas tersebut dapat berupa hasil yang positif maupun yang bersifat negatif.

Kesimpulan

1. Potensi kearifan lokal di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai akar pengelolaan sumber daya alam dalam konteks keistimewaan, merupakan sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Falsafah “memayu hayuning bawana” digambarkan dengan garis imajiner Gunung Merapi – Karaton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat – Samudera Indonesia (Laut Selatan), merupakan landasan hidup bagi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta berdampingan dengan lingkungan hidupnya.
3. Kearifan lokal yang digambarkan oleh garis imajiner Gunung Merapi – Karaton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat – Samudera Indonesia (Laut Selatan) memuat 4 (empat) anasir alam, yaitu (1) api digambarkan oleh Gunung Merapi yang merupakan simbol amarah, (2) tanah dan angin yang disimbolkan oleh Karaton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai perwujudan manusia sebagai ciptaanNya, dan (3) anasir air yang disimbolkan oleh Samudera Indonesia (Laut Selatan) sebagai pembersih dan sumber kehidupan bagi manusia dan lingkungan hidupnya.
4. Falsafah “Memayu Hayuning Bawana” diimplementasikan dalam konteks Undang-Undang No 13 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai landasan pengelolaan sumber daya alam di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diwujudkan dengan pendayagunaan kearifan lokal seperti yang tersebut pada Pada Bab III tentang Asas dan Tujuan, bagian kesatu, Asas, Pasal 4, yang mengatakan Pengaturan Keistimewaan DIY dilaksanakan berdasarkan (a) pengakuan atas hak asal-usul; (b) kerakyatan; (c) demokrasi; (d) kebhinekaan-tunggal-ika; (e) efektifitas pemerintahan; (f) kepentingan nasional dan; (g) pendayagunaan kearifan lokal.



DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Widiyanto dan Iwan Meulia Pirous. 2009. *Kumpulan Tulisan Koentjaraningrat Memorial Lectures I-IV/2004-2008: Perspektif Budaya*. Jakarta: Rajawali Press.
- Imam Budi Santosa. 2012. *Nasihat Hidup Orang Jawa*. Yogyakarta: DIVA Press.
- Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. 2002. *Bunga Rampai Kearifan Lingkungan*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup.
- Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI. 2006. *Kearifan Lingkungan Untuk Indonesiaku*. Yogyakarta: Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Jawa.
- Nasruddin Anshoriy dan Sudarsono. 2008. *Kearifan Lingkungan: dalam Perspektif Budaya Jawa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Pitoyo Amrih. 2008. *Ilmu Kearifan Jawa*. Yogyakarta: Pinus Book Publisher.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2013. *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Sebuah Pendekatan Sejarah Hukum dan Teori Kekuasaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suwardi Endraswara. 2013. *Memayu Hayuning Bawana: Laku Menuju Keselamatan dan Kebahagiaan Hidup Orang Jawa*. Yogyakarta: Penerbit NARASI (Anggota IKAPI).
- Totok Gunawan. 2007. *Pendekatan Ekosistem Bentanglahan Sebagai Dasar Pembangunan Wilayah Berbasis Lingkungan di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Makalah Disampaikan Pada Seminar Nasional Pembangunan Wilayah Berbasis Lingkungan di Indonesia dan Kongres Ikatan Geografiwan Universitas Gadjah Mada (IGEGAMA), Yogyakarta, 27 Oktober 2007.
- Undang-Undang No. 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.